

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
(SIPD) DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN
DAERAH PADA KANTOR CAMAT BANJANG KABUPATEN HULU
SUNGAI UTARA**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Program Studi Administrasi Publik



OLEH

HINDRI RUSADI

NPM : 2022297

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) AMUNTAI**

2026

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama:

Nama : HINDRI RUSADI

NPM : 2022297

Program Studi : S1 Administarasi Publik

Judul Skripsi : **“IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH PADA KANTOR CAMAT BANJANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”**

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan seperlunya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbingan Skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

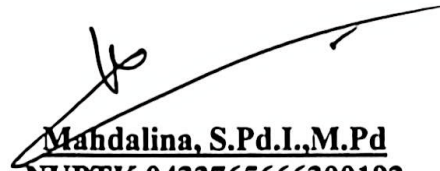
Amuntai, April 2026

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Dr. Irza Setiawan, S.Sos., M.AP
NUPTK. 9456765666137023



Mahdalina, S.Pd.I., M.Pd
NUPTK.0433765666300192



Mengetahui,
Kepala Program Studi Administrasi Publik

Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A
NIK. 19921104 2015091 021

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. beserta keluarga dan sahabat-sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah yang diberikan Allah SWT. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH PADA KANTOR CAMAT BANJANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA** dengan baik dan lancar.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan pendidikan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) jurusan Ilmu Administrasi Publik pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, maka perkenankan penulis untuk menyampaikan ungkapan terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan, kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos., M.AP., CIQnR. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
2. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
3. Bapak Dr. Irza Setiawan, S.Sos, M.AP. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Ibu Mahdalina, S.Pd.I, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen beserta staff Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang berguna bagi peneliti.
6. Kepada Camat Banjang beserta Jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran serta dukungan untuk penyelesaian proses skripsi ini.
7. Kepada masyarakat yang bersedia membantu dan mendukung akan kelancaran proses skripsi ini.
8. Kepada Kedua orang tua serta seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat dan mendo'a kan serta membantu baik itu dukungan moral maupun moril.
9. Kepada seluruh teman-teman, sahabat dan semua pihak yang turut membantu lancarnya penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan pengarahan yang telah diberikan kepada peneliti mendapat ganjaran pahala dari Allah SWT. Terlepas dari itu, peneliti menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga mungkin dalam penyusunan proposal skripsi ini masih terdapat kekurangan, baik dari teknik penulisan maupun uraian materi. Oleh karena itu, peneliti mengharap kritik dan saran dari pembaca untuk menambah wawasan peneliti.

Akhir kata peneliti berharap semoga proposal skripsi ini dapat memberi manfaat maupun inspirasi bagi peneliti dan semua pihak yang memerlukannya.

Amuntai, Maret 2026

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu	8
B. Tinjauan Teoritis	9
C. Kerangka Pemikiran.....	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Tipe Penelitian	28
D. Data dan Sumber Data	29
E. Desain Operasional Penelitian	31
F. Teknik Pengumpulan Data.....	32

G. Teknik Analisis Data.....	33
H. Uji Kredibilitas Data	36

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	Informan Penelitian	30
Tabel 3. 2	Desain Operasional Penelitian.....	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	27
------------	--------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan telah mendorong perubahan mendasar dalam praktik tata kelola publik, khususnya pada era reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi. Dinamika sosial tersebut tidak lagi bersifat opsional, melainkan menjadi keniscayaan yang menuntut adaptasi kelembagaan secara sistematis. Peningkatan ekspektasi masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah semakin menguat, terutama setelah maraknya kasus penyimpangan anggaran yang berimplikasi pada menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Dalam konteks ini, pemanfaatan teknologi informasi untuk mendigitalisasi sistem keuangan daerah dipandang sebagai langkah strategis guna memperkuat prinsip-prinsip good governance.

Pada tingkat kecamatan, urgensi penerapan sistem digital menjadi semakin signifikan mengingat posisi kecamatan sebagai garda terdepan pelayanan publik. Kantor camat tidak hanya menjalankan fungsi administratif rutin, tetapi juga bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran operasional serta pelaksanaan kegiatan pembangunan berskala lokal. Oleh karena itu, setiap bentuk ketidakefisienan atau kelemahan dalam tata kelola keuangan di level ini berpotensi memengaruhi kualitas layanan yang diterima masyarakat secara langsung.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bekerja dengan mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah dalam satu sistem berbasis elektronik. Proses ini dimulai dari tahap perencanaan program dan kegiatan yang diinput oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk kantor kecamatan sebagai bagian dari perangkat daerah. Selanjutnya, data perencanaan tersebut digunakan sebagai dasar dalam penyusunan anggaran yang kemudian akan terakumulasi secara otomatis dalam laporan keuangan daerah yang dapat digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dengan mekanisme tersebut, SIPD diharapkan mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, pemerintah pusat menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Regulasi ini mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk mengoperasikan sistem terintegrasi dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang mengatur klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan serta keuangan daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang memuat pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah berbasis sistem informasi. Kerangka regulatif ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun

sistem pengelolaan keuangan yang lebih tertib, transparan, dan terstandarisasi secara nasional.

Implementasi SIPD di tingkat kecamatan masih menghadapi tantangan. Kantor camat sebagai perangkat daerah yang berperan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah seringkali mengalami kendala dalam penggunaan sistem berbasis digital.

Berikut beberapa kendala yang sering terjadi dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di kantor camat Banjang antara lain:

1. Gangguan server dan sistem terpusat menunjukkan bahwa adanya risiko teknis pada arsitektur sistem yang terintegrasi secara nasional. Ketika server pusat mengalami *overload* atau *down*, proses penginputan, validasi, dan pelaporan data keuangan daerah menjadi terlambat. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada keterlambatan administrasi, tetapi juga berpotensi mengganggu siklus perencanaan dan penganggaran daerah yang telah ditetapkan.
2. Ketergantungan pada jaringan internet turut memperkuat kerentanan sistem. Di sejumlah wilayah, kualitas konektivitas masih belum merata, sehingga akses terhadap aplikasi berbasis web seperti SIPD menjadi tidak stabil. Hambatan ini mengidentifikasi bahwa keberhasilan digitalisasi tata kelola keuangan daerah tidak hanya ditentukan desain sistem.
3. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM), baik dari segi jumlah maupun kualitas, semakin memperberat tantangan tersebut. Dibanyak

unit kerja, penguasaan SIPD sering kali hanya dimiliki oleh satu atau dua operator. Ketergantungan pada individu tertentu menciptakan risiko institusional apabila terjadi muatsi, cuti, atau kendala lainnya.

Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam penginputan data, kurang optimalnya pengelolaan keuangan, serta ketidaktepatan dalam penyusunan laporan.

Kondisi tersebut tentunya berkaitan erat dengan akuntabilitas keuangan daerah. Akuntabilitas keuangan daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah secara transparan, efektif, efisien, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penrapan SIPD diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah karena seluruh proses pengelolaan keuangan tercatat secara sistematis dapat diawasi dengan lebih mudah.

Namun, apabila Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di tingkat kecamatan, khususnya di kantor camat Banjang belum berjalan secara optimal, maka tujuan peningkatan akuntabilitas keuangan daerah juga belum dapat tercapai secara maksimal. Hal ini dikarenakan kualitas laporan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh ketepatan, kelengkapan, dan keakuratan data yang diinput ke dalam sistem. Ketidaksesuaian data, keterlambatan penginputan, serta kurang optimalnya pemanfaatan sistem dapat berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan daerah. Oleh karena itu, Implementasi SIPD di kantor Camat

Banjang menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan guna mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah.

Kantor Camat Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi konteks yang relevan untuk mengkaji fenomena ini. Sebagai perangkat daerah yang mengelola anggaran operasional sekaligus berperan sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten dan desa, efektivitas penerapan SIPD di lingkungan kantor camat berimplikasi langsung terhadap kualitas pertanggungjawaban keuangan serta mutu pelayanan publik. maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH PADA KANTOR CAMAT BANJANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”**

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada kantor camat Banjang. Fokus penelitian ini difokuskan pada Implementasi E-Goverment Dari Richardus Eko Indrajit (2016)

1. Support (Dukungan)
2. Capacity (Kapasitas)
3. Value (Manfaat)

C. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi SIPD dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah pada kantor camat Banjang?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam implementasi SIPD dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah pada kantor camat Banjang?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui implementasi dari SIPD dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah pada kantor camat Banjang.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah pada Kantor Camat Banjang.

E. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan berbasis digital dan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan

implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan akuntabilitas keuangan daerah pada tingkat pemerintahan kecamatan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak yang terkait dengan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Bagi Kantor Camat Banjang, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi dalam meningkatkan implementasi SIPD sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih transparan, efektif, dan akuntabel. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan serta meningkatkan dukungan terhadap implementasi SIPD, khususnya pada tingkat kecamatan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan dalam mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan implementasi sistem informasi pemerintahan daerah dan akuntabilitas keuangan daerah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Niken Amalina, 2025. **Efektivitas Penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Indonesia** dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam 45 Bekasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas implementasi SIPD dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (*literature review*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui sintesis berbagai temuan empiris terkait penerapan SIPD di sejumlah pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan, integrasi data perencanaan dan penganggaran, serta penguatan mekanisme kontrol administratif. Namun demikian, efektivitasnya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, gangguan sistem terpusat, serta rendahnya kompetensi aparatur dalam pengoperasian sistem. Studi ini menegaskan bahwa optimalisasi SIPD sangat bergantung pada kesiapan teknis dan kapasitas sumber daya manusia guna mewujudkan akuntabilitas keuangan yang lebih baik.
2. Ni Ade Sriarnita Febriana, 2025. **Analisis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai Alat Evaluasi Akuntabilitas**

Pengelolaan Keuangan (Studi Kasus pada Kantor Camat Kubu, Kabupaten Karangasem) mahasiswa Program Studi D4 Akuntansi Sektor Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana implementasi SIPD digunakan sebagai instrumen evaluasi dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada tingkat kecamatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aparatur yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD mampu meningkatkan ketertelusuran transaksi, konsistensi pelaporan, serta mempermudah proses monitoring dan evaluasi anggaran. Kendati demikian, ditemukan hambatan berupa keterbatasan jaringan internet, ketergantungan pada server pusat, serta kebutuhan pelatihan teknis bagi aparatur. Penelitian ini menegaskan bahwa implementasi SIPD pada level kecamatan memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem pertanggungjawaban keuangan daerah.

B. Tinjauan Teoritis

1. E-Government

E-Government menjelaskan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, serta akuntabilitas pemerintahan. World Bank mendefinisikan e-government sebagai penggunaan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah untuk meningkatkan

hubungan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (World Bank, 2015). Dalam konteks penelitian ini, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan bentuk implementasi e-government dalam pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pada Kantor Camat Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Menurut Richardus Eko Indrajit (2016), keberhasilan implementasi e-government ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu Support, Capacity dan Value.

- a. Support atau dukungan merupakan komitmen dari pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan berbasis teknologi informasi. Dukungan tersebut meliputi dukungan kebijakan, dukungan anggaran, serta dukungan dari pimpinan organisasi. Tanpa adanya dukungan yang kuat dari pimpinan, implementasi sistem berbasis digital sulit untuk berjalan secara optimal.
- b. Capacity atau kapasitas berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam mengimplementasikan sistem digital. Kapasitas tersebut meliputi ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta kesiapan organisasi dalam mengoperasikan sistem informasi. Kapasitas yang memadai menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

- c. Value atau manfaat berkaitan dengan nilai yang dihasilkan dari implementasi sistem digital. Implementasi SIPD diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, implementasi SIPD tidak hanya berfungsi sebagai sistem teknologi, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

2. Implementasi kebijakan

a. Defenisi Implementasi Kebijakan

Secara etimologis “implementasi” seperti yang dijelaskan oleh Mazmanian dan Sabatier (Pramono, 2020), bahwa implementasi merujuk pada fokus pelaksanaan kebijakan, yang mencakup tindakan dan kegiatan yang terjadi setelah kebijakan disahkan oleh pemerintah. Hal ini mencakup upaya untuk mengadministrasikan kebijakan dan mempengaruhi masyarakat atau situasi yang terjadi. Sedangkan istilah "kebijakan" dipakai untuk merujuk pada aktivitas pemerintah seperti perilaku negara pada umumnya.

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Pada kamus besar Webster dikutip oleh Karla, et.al (2021), *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying*

out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Menurut Mazmanian dan Sebastiar masih dalam Karla, et.al (2021), implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Secara umum, implementasi bertugas membangun suatu mata rantai yang memungkinkan tujuan dari suatu kebijakan dapat diwujudkan sebagai akibat dari tindakan pemerintah. Maka dari itu, implementasi perlu melibatkan pembentuk "sistem penyampaian kebijakan" di mana fasilitas tersebut dirancang khusus dengan harapan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Rian Nugroho (Lumabi, 2021), pelaksanaan kebijakan merupakan cara untuk mencapai target yang lebih jauh dengan memastikan bahwa tindakan yang diambil sejalan dengan arah yang sudah ditentukan. Implementasi ini penting untuk memastikan ketercapaian suatu kebijakan.

b. Model -model Implementasi Kebijakan

1) Implementasi model Van Metter dan Van Horn Van Metter dan Van Horn

Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh van Metter & van Horn disebut dengan istilah *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan

sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Ada enam variabel, menurut van Metter & van Horn, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik.

a) Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

b) Sumber daya.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses

implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau-tidak-mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan.

c) Karakteristik Agen Pelaksana.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat

serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan.

Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

d) Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan dari atas' (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusan-nya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

e) Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi; dan begitu pula sebaliknya.

f) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter & van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

2) Implementasi kebijakan model George C. Edward III

Teori dari George C. Edward III menyebutkan model implementasi kebijakan publiknya yaitu “implementasi langsung dan tidak langsung”. ada empat variabel yang berpengaruh dalam keberhasilan suatu kebijakan yaitu:

- a) Komunikasi. Menurut Edward III, variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah komunikasi. Komunikasi merupakan faktor penting untuk mencapai tujuan dalam implementasi kebijakan publik yang efektif. Dalam hal ini, keputusan dan peraturan harus dikomunikasikan dengan baik kepada semua pelaksana yang terlibat agar mereka mengetahui apa yang harus dilaksanakan. Ada dua indikator dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yakni transmisi, kejelasan, dan konsistensi.
- b) Sumber daya. Sumber daya merupakan variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Edward III untuk menerapkan suatu kebijakan, indikator sumber daya terdiri dari beberapa indikator, seperti staf, informasi, wewenang, dan fasilitas.
- c) Disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik. Sikap implementor kebijakan menjadi faktor penting dalam pendekatan implementasi kebijakan publik yang efektif. Implementor kebijakan tidak hanya perlu mengetahui apa yang harus dilaksanakan, namun harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya. Variabel disposisi memiliki dua hal yang

harus diperhatikan, yaitu pengangkatan birokrat dan insentif.

- d) Struktur birokrasi. Menurut Edward III, variabel keempat yang berpengaruh dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Meskipun sumber daya untuk melakukan kebijakan tersedia, atau implementor kebijakan tahu apa yang harus dilaksanakan dan ingin melaksanakannya, kebijakan tersebut mungkin tidak terealisasi jika ada kekurangan pada struktur birokrasi.

3) Implementasi Kebijakan Model Merilee S. Grindle

Menurut Merilee S. Grindle dalam (Agustino, 2016) keberhasilan suatu kebijakan public dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle juga amat ditentukan oleh tingkat *implementability* yang terdiri atas *content of policy* dan *context of policy*. *Content of policy* menurut Grindle adalah:

- a) Kepentingannya mempengaruhi. Kebijakan yang dibuat membawa dampak terhadap proses politik yang di “stimuli” oleh kegiatan perumusan kebijakan.
- b) Manfaat yang diperoleh. Kebijakan yang memberikan manfaat kolektif, dapat dengan mudah untuk diterapkan. Sedangkan kebijakan yang hanya menyediakan manfaat

dan dapat habis dibagi dan bersifat khusus dapat menimbulkan konflik.

- c) Perubahan yang diharapkan. kebijakan dalam jangka panjang menuntut perubahan, pelaksana akan mengalami kesulitan dalam implementasinya.
- d) Letak pengambilan keputusan. Semakin tersebar pelaksana baik secara geografis maupun organisasi, maka akan semakin susah untuk diterapkan.
- e) Pelaksana program. Kualitas dari pelaksana kebijakan dapat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan implementasi.
- f) Sumber-sumber yang dapat dialokasikan. Ketersediaan sumber daya yang mencukupi dapat menunjang implementasi kebijakan.

Context of policy menurut Grindle adalah:

- a) Kekuasaan, kepentingan serta strategi dari para aktor yang terlibat. Keterlibatan para aktor ditentukan berdasarkan isi serta bentuk dari kebijakan yang diadministrasikan.
- b) Ciri-ciri kelembagaan/rezim yang berkuasa. Kemampuan dari para pihak yang terlibat dan karakteristik dari rezim di mana berinteraksi, mempermudah penilaian terhadap tingkat peluang untuk mewujudkan tujuan kebijakan.
- c) Respons dan daya tanggap. Pelaksana harus fokus pada bagaimana menciptakan konsistensi tujuan dalam

kebijakan. Pelaksana perlu mampu mengubah sikap menentang menjadi menerima dari suatu kebijakan.

4) Implementasi kebijakan model Daniel Mazmanian & Paul A. Sabatier

Model implementasi kebijakan publik yang lain ditawarkan oleh Daniel Mazmanian & Paul A. Sabatier. Model implementasi yang ditawarkan mereka disebut dengan *A framework for policy implementation analysis*. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuan dalam mengidentifikasi variable-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Dan variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu:

- a) Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap
- b) Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat
- c) Variabel-variabel di luar undang-undang yang mempengaruhi implementasi

3. Sistem Informasi

Sistem Informasi (SI) adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara

orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Menurut Gordon B. Davis dikutip Citta et.al (2020) sistem informasi adalah suatu sistem yang menerima input atau masukan data dan instruksi, mengolah data sesuai dengan instruksi dan mengeluarkan hasilnya.

Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi, sedangkan sistem informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Data yang diolah saja tidak cukup dapat dikatakan sebagai suatu informasi. Agar dapat berguna, maka informasi harus didukung oleh tiga pilar sebagai berikut : tepat kepada orangnya atau relevan (*relevance*), tepat waktu (*timeliness*), dan tepat nilainya atau akurat (*accurate*). Keluaran yang tidak didukung oleh tiga pilar ini tidak dapat dikatakan sebagai informasi yang berguna, tetapi merupakan sampah (*garbage*) (Citta et.al, 2020).

4. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70, Tahun 2019, Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Ruang lingkup SIPD meliputi, informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya.

sistem informasi SIPD dapat digunakan untuk mendukung integrasi pemanfaatan data terkait dengan perkembangan

pembangunan pada masing-masing instansi pemerintah. Selain itu, fungsi SIPD sebagai media akuntabilitas publik yang memungkinkan masyarakat mengevaluasi kinerja pemerintah, mengevaluasi program-program pembangunan, dan sekaligus mengevaluasi capaian-capaian pembangunan.

SIPD memegang peran penting dalam mendukung ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang mutakhir, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, SIPD juga berperan dalam mendorong sinkronisasi data antara pusat dan daerah untuk mencapai single database nasional. Oleh karena itu, penggunaan SIPD harus dioptimalkan untuk mendukung tercapainya sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah yang efektif dan efisien (Winarno, Kusnadi, & Afriliana, 2019). E-Database adalah aplikasi online yang digunakan untuk mendokumentasikan dan mengadministrasikan data dan informasi kondisi daerah. Tujuan diluncurkannya SIPD oleh Kemendagri adalah untuk memudahkan daerah dalam melakukan perencanaan dan penganggaran dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi dan seragam di seluruh daerah (Ekaputra, 2021).

Untuk mencapai Good Governance dan menghasilkan satu data Indonesia yang akurat dan terintegrasi mulai dari tingkat daerah hingga tingkat pusat, sangat penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu secara Nasional. Untuk itu, diterbitkanlah Permendagri Nomor 70 Tahun

2019 yang mengatur jenis SIPD yang dapat dikembangkan Pemerintah Daerah menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

- a. Informasi Pembangunan Daerah. SIPD memiliki kemampuan untuk mengelola data dan informasi terkait perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan banyak elemen. Dengan menggunakan SIPD, dapat memudahkan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA-PD, dan RENJA-PD serta memberikan profil dan analisis tentang pelaksanaan pembangunan daerah. Data dan informasi ini dapat digunakan sebagai referensi dalam memperbarui data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
- b. Informasi Keuangan Daerah. SIPD dapat mengelola data keuangan daerah dengan efektif dan efisien, dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi. SIPD mampu melakukan pengelolaan keuangan daerah, seperti perencanaan keuangan daerah, pelaksanaan dan penatausahaan anggaran daerah, akuntansi dan pelaporan anggaran daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran daerah, pertanggungjawaban barang milik daerah, serta informasi keuangan daerah lainnya.
- c. Informasi Pemerintah Daerah Lainnya. Selain itu, SIPD juga mampu memberikan informasi umum lainnya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, seperti Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dalam satu tahun,

PERDA, dan informasi umum lainnya yang dikelola oleh berbagai elemen terkait.

5. Akuntabilitas keuangan

Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas keuangan daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya publik secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas keuangan daerah dapat diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang transparan, penggunaan anggaran yang efektif, serta adanya pengawasan terhadap penggunaan dana publik. Dengan adanya sistem informasi berbasis digital seperti SIPD, akuntabilitas keuangan daerah diharapkan dapat meningkat karena seluruh proses pengelolaan keuangan tercatat secara sistematis.

Akuntabilitas merupakan konsep fundamental dalam tata kelola organisasi yang mengacu pada kewajiban individu atau lembaga untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, serta penggunaan sumber daya kepada pihak-pihak yang berwenang. Dalam ranah akademik, akuntabilitas dipahami tidak sekadar sebagai pertanggungjawaban formal, melainkan juga sebagai mekanisme kontrol yang mencakup transparansi, integritas, dan responsivitas terhadap pemangku kepentingan.

Dalam konteks pengelolaan keuangan publik dan organisasi sektor publik, akuntabilitas berkaitan erat dengan kualitas pelaporan dan efektivitas penggunaan sumber daya yang dikelola, serta

bagaimana lembaga tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun badan pengawas eksternal. Akuntabilitas melibatkan kewajiban untuk menyusun laporan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akurat sesuai standar yang berlaku.

Akuntabilitas keuangan merupakan bagian khusus dari akuntabilitas yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya keuangan. Dalam pengertian akademik, akuntabilitas keuangan merujuk pada kewajiban suatu entitas terutama organisasi publik untuk bertanggung jawab atas penggunaan dana publik melalui penyusunan dan penyampaian laporan keuangan yang akurat, transparan, jujur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan.

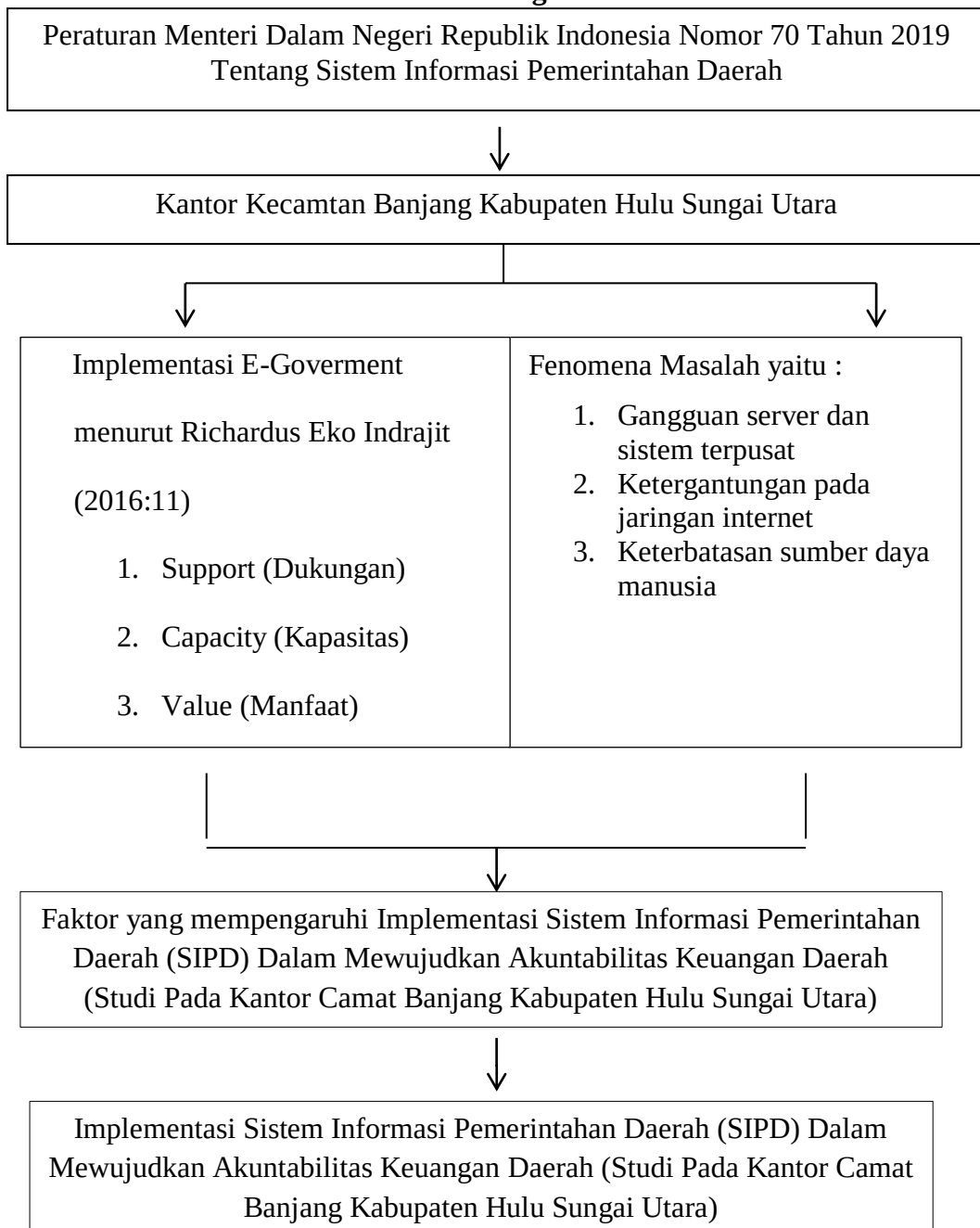
Secara teoritik, akuntabilitas keuangan sering dikaitkan dengan teori keagenan (*agency theory*), di mana terdapat hubungan antara pihak prinsipal (seperti masyarakat atau pemegang saham) dengan agen (pihak yang diberi tanggung jawab mengelola sumber daya). Ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dan agen dapat menimbulkan masalah *moral hazard* dan risiko penyimpangan penggunaan dana, sehingga diperlukan mekanisme akuntabilitas dalam bentuk pelaporan yang sistematis, pengawasan eksternal, dan audit independen.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual yang menghubungkan antara teori dengan beberapa faktor yang diidentifikasi

sebagai masalah penting. Manfaat dari kerangka berpikir yaitu membantu peneliti dalam menguji rumusan masalah, membantu memilih serta menemukan model yang cocok dalam penelitian. Pada dasarnya penguraian kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada teori implementasi e-government menurut Richardus Eko Indrajit (2016) yang terdiri dari tiga indikator utama yaitu Support, Capacity dan Value. Sehingga dapat diketahui apakah kebijakan SIPD dapat mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah atau tidak. penjabaran kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kantor Camat Banjang yang beralamat di Jalan Jermani Husin RT. 4, Kaludan, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif menurut Sugiyono(2016: 8) yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Karena pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif,yang menjadi alat instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri.

C. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif-kualitatif, yaitu memberikan gambaran atau menyajikan data sesuai dengan keadaan objek yang sebenarnya dengan harapan mendapatkan gambaran yang menyeluruh sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian secara mendalam.

Artinya penelitian. tersebut dilakukan untuk mengungkap segala sesuatu atau berbagai aspek dari sasaran penelitiannya.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data merujuk pada hasil pencatatan oleh peneliti, yang mencakup baik fakta maupun angka. Data dapat didefinisikan sebagai kumpulan fakta dan angka yang bisa digunakan untuk membuat informasi. Sementara itu, informasi adalah hasil dari proses pengolahan data yang digunakan untuk tujuan penelitian.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.

2. Sumber Data

Informan adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber.

Teknik pengambilan sampel informan pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Menurut Sugiyono Sugiyono dalam Rosdianto (2017:56) adalah teknik pengambilan sampel dari sumber data dengan pertimbangan tertentu oleh peneliti, yaitu siapa saja yang dianggap cocok dan sesuai sebagai sumber data.

Tabel 3. 1
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Rully Lesman, S. STP, M. AP	Camat
2	Ahmad Ma'rifatullah, S. STP, M. IP	Sekretaris Camat
3	Misliawati	Kasubbag Keuangan dan TU
4	Syamsuardi	Bendahara
5	Bahriansyah, S. E. I	Kasubbag Program dan Data
6	Sentika Afriani, S. H	Kasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
7	Adi Warni, S. Sos	Kasi Ketentraman dan Pendapatan
8	Reny Damayanti, S. STP	Kasi Pelayanan, Perekonomian dan Kensos
9	Akhmad Setiawan, S. Kom	Pengelola Barang Milik Daerah (BMD) Kecamatan
10	Lisda Ermita	Staf

11	Rita Lisnawati	Staf
Jumlah		11 orang

Sumber : Peneliti februari (2026)

E. Desain Operasional Penelitian

Dalam penelitian kualitatif desain operasional penelitian berfungsi sebagai acuan dalam pembuatan kerangka wawancara. Berkaitan dengan penelitian ini mengenai Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Daerah (Studi Pada Kantor Camat Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara) maka dibuatlah suatu desain operasional penelitian untuk mengatur baik buruknya suatu konsep. Untuk lebih jelasnya tentang desain operasional ini dapat dilihat pada table berikut dibawah ini:

Tabel 3. 2
Desain Operasional Penelitian

variabel	Sub varibel	Indikator
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Daerah Pada Kantor Camat Banjang	Support (Dukungan)	1. Political Will 2. Aspek Legalitas 3. Alokasi Sumber Daya
	Capacity (Kapasitas)	1. Ketersediaan Infrastruktur 2. Sumber Daya Manusia (SDM) 3. Kesiapan Organisasi
		1. Efisiensi &

Kabupaten Hulu Sungai Utara menurut Richardus Eko Indrajit (2016:11)	Value (Manfaat)	Efektivitas 2. Akuntabilitas & Transparansi 3. Kepuasan Pengguna
--	-----------------	---

Sumber : Peneliti Maret (2026)

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Jadi teknik observasi yaitu teknik yang digunakan secara langsung pada objek untuk mendapatkan data dengan meliha, dan mencatat mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan.

Menurut Sateorid dalam Ibrahim (2018:81) Observasi dapat dipahami sebagai pengamatan langsung terhadap objek, untuk mengetahui kebenarannya, situasi, kondisi, konteks, ruang serta maknanya dalam upaya pengumpulan data suatu penelitian. Kaelan dalam Ibrahim (2018:81) mengatakan observasi atau atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian. Oleh karena itu observasi dapat dikatakan sebagai dasar utama dilakukan penelitian.

2. Wawancara

Menurut Pasolong (2016 : 137) Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut interviewer, sedangkan orang yang diwawancarai disebut interview. Metode wawancara bisa dilakukan secara langsung (Personal interview) maupun tidak langsung (Telephone atau mail interview).

3. Dokumentasi

Menurut Ibrahim (2018:93) Dokumentasi dalam penelitian mempunyai dua makna, Pertama, dokumen yang dimaksudkan sebagai alat bukti tentang sesuatu, termasuk catatan-catatan, foto, rekaman video atau apapun yang dihasilkan oleh seorang peneliti. Kedua, dokumen yang berkenaan dengan peristiwa atau momen atau kegiatan yang telah lalu, yang padanya mungkin dihasilkan sebuah informasi, fakta dan data yang diinginkan dalam penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2023), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Analisis menurut Miles dan Huberman dalam Husnu Abadi (2020:163) dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu, Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melalui abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil pengalihan data. Data yang diperoleh melalui wawancara, pengamatan lapangan, survei kepuasan pelanggan, dan lainnya, cenderung memiliki kompleksitas yang tinggi. Untuk mengatasi hal ini, semua data yang terkumpul harus dikelompokkan berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu data yang sangat penting, kurang penting, dan tidak penting. Data yang kurang penting dapat dibuang, sehingga hanya data yang penting saja yang dipertahankan. Hal ini memungkinkan data yang tersedia menjadi lebih sederhana, lebih relevan dengan kebutuhan penelitian, dan dapat mewakili keseluruhan data yang terkumpul. Dengan demikian, data akan lebih mudah diproses ke tahap berikutnya dan diubah menjadi informasi

yang mudah dimengerti, jelas, dan dapat memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi.

b. Penyajian Data

Berdasarkan analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, setelah tahap reduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data atau data display. Pada tahap ini, peneliti dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan bentuk tabel, grafik, atau bentuk lainnya agar data tersebut dapat disampaikan dengan lebih mudah. Proses penyajian data sangat penting dalam analisis data kualitatif agar data yang disajikan menjadi lebih terorganisir, sistematis, dan mudah dipahami. Selain itu, data yang telah disajikan juga dapat memberikan informasi yang jelas kepada pembaca.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan. Data yang telah disusun dan dikelompokkan dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dengan teknik atau pola tertentu. Kesimpulan tersebut dapat diungkapkan dalam laporan penelitian dan ditempatkan pada bagian penutup agar pembaca juga dapat menemukan kesimpulan tersebut. Namun, penarikan kesimpulan hanya dapat dilakukan setelah semua data yang beragam telah direduksi, disusun, dan ditampilkan dengan media tertentu agar mudah dipahami. Dengan demikian, data yang semula mentah dapat disajikan sebagai suatu informasi yang relevan.

H. Uji Kredibilitas Data

Adapun uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif, antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, dan triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan membercheck. (Sugiyono, 2016: 270) antara lain:

1. Perpanjangan Pengamatan

Hal ini dilakukan untuk menghapus jarak antara peneliti dan narasumber sehingga tidak ada lagi informasi yang disembunyikan oleh narasumber karena telah mempercayai peneliti. Perpanjangan waktu pengamatan dapat diakhiri apabila pengecekan kembali lapangan telah kredibel.

2. Peningkatan Ketekunan

Pengamatan yang cermat dan berkesinambungan merupakan wujud dari peningkatan ketekunan yang dilakukan oleh peneliti. Ini dimaksudkan guna meningkatkan kredibilitas data yang diperoleh. Dengan demikian peneliti dapat mendeskripsikan data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

3. Triangulasi

Ini merupakan teknik yang mencari pertemuan pada satu titik tengah informasi dari data yang terkumpul guna pengecekan dan pengembangan terhadap data yang telah ada. Dengan demikian didapat Triangulasi Sumber, Triangulasi Teknik, Triangulasi Waktu.

a. Triangulasi Sumber

menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh kemudian dideskripsikan dan dikategorisasikan sesuai dengan apa yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut, peneliti akan melakukan pemilahan data yang sama dan data yang berbeda untuk analisis lebih lanjut.

b. Triangulasi Teknik

Pengujian ini dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya dengan melakukan observasi, wawancara, atau dokumentasi. Apabila terdapat hasil yang berbeda maka peneliti melakukan konfirmasi kepada sumber data guna memperoleh data yang besar.

c. Triangulasi Waktu

Narasumber yang ditemui pada pertemuan awal dapat memberikan informasi yang berbeda pada pertemuan selanjutnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengecekan berulang-ulang agar ditemukan kepastian data yang lebih kredibel.

4. Analisis Kasus Negatif

Melakukan kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

5. Diskusi dengan Teman Sejawat atau Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Bahan yang dimaksud dapat berupa alat perekam suara, kamera handycam dan lain sebagainya yang dapat digunakan oleh peneliti selama melakukan penelitian. Bahan referensi yang dimaksud ini sangat mendukung kredibilitas data.

6. Mengadakan Membercheck

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data atau informan. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut valid. Pelaksanaan data selesai, atau setelah satu periode pengumpulan data selesai setelah mendapat satu temuan, atau kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Edisi Revisi). *Alfa Beta*.
- Amalina, N. (2025). Efektivitas penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. *FORMULA: Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 45–52.
- Febriana, N. A. S. (2025). *Analisis sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) sebagai alat evaluasi akuntabilitas pengelolaan keuangan (Studi kasus pada Kantor Camat Kubu, Kabupaten Karangasem)* [Skripsi, Universitas Pendidikan Ganesha]. Repositori Universitas Pendidikan Ganesha.
- Fitriah, R. N., & Johannes, A. W. (2025). *Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui sistem informasi pemerintahan daerah*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Ibrahim, (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, cv.
- Ibrahim. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Edisi Kedua, Bandung : Alfabeta
- Indrajit, R. E. (2016). *Electronic government: Strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital*. Yogyakarta: Andi.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah*.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah*.

Mahmudi. (2019). *Manajemen kinerja sektor publik*. UPP STIM YKPN.

Manik, S. H., Dewi, R. S., & Fauzi, I. (2025). Analisis penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) terhadap kualitas laporan keuangan Kota Subulussalam. *JUMBIWIRA: Jurnal Manajemen & Bisnis*.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.

Palestin, I., & Raharja, S. (2025). *Evaluasi sistem informasi pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah di Indonesia (Studi kasus pada Pemerintah Kota Tegal)*. Universitas Diponegoro.

Pasolong, Harbani. 2016. *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kemendagri.

Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Kebijakan Publik*.

Purba, E. R. D. B. (2025). *Prosedur pengajuan surat perintah pencairan dana (SP2D) melalui sistem informasi pada dinas penanaman modal*. Universitas Jambi.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Tim Penyusun 2022 Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sarjana Strata 1
(S1) Amuntai : STIA Amuntai